

**PENGARUH KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH, MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, TEMUAN AUDIT, DAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH**

**Muhammad Rizki Alkhasani , Murtanto**  
Universitas Trisakti

Correspondence		
Email: <a href="mailto:023002214020@std.trisakti.ac.id">023002214020@std.trisakti.ac.id</a> <a href="mailto:murtanto@trisakti.ac.id">murtanto@trisakti.ac.id</a>		No. Telp:
Submitted 16 Juli 2024	Accepted 21 Juli 2024	Published 22 Juli 2024

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja pengendalian internal daerah, temuan dan rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan daerah yakni pengaruh positif kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan serta pengaruh negatif temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linear dengan SPSS 25.0. Penelitian ini menemukan bahwa maturitas SPIP, kapabilitas APIP, dan tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah dan temuan audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dari rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektifitas PAD. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kualitas APIP dan SPIP serta responsivitas dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan, serta upaya mengurangi temuan audit yang didapatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian serta mengeksplorasi variabel lain termasuk yang dapat memediasi variabel independen terhadap variabel dependen

**Pendahuluan**

Sebagai konsekuensi atas penerapan konsep otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan dan kebijakan dalam bidang-bidang yang menjadi kewenangannya. Salah satu dari kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah atau dikenal sebagai konsep desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal diberikan dengan harapan mampu merealisasikan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan (Ningsih, 2023).

Sebagai konsekuensi atas otonomi daerah ini, total anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi luar biasa besar. Pengelolaan dana yang besar ini mendorong diperlukannya sistem pengendalian internal yang memadai. Sistem Pengendalian Internal yang baik menjadi syarat mutlak agar akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi tercapai karena tujuan dari Sistem Pengendalian Internal ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas keuangan (Pujiono et al, 2016). Dalam lingkup keuangan publik di Indonesia, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah Sistem Pengendalian Keuangan Publik di Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pengukuran tingkat kematangan SPIP dalam menerapkan pengendalian internal menggunakan sebuah instrumen yang disebut maturitas (Prakoso, 2024). Lebih lanjut berdasarkan PP tersebut, tugas untuk melakukan pengawasan dalam kerangka penerapan SPIP menjadi kewenangan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang secara berjenjang ada mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Penerapan SPIP yang memadai dan

kapabilitas APIP diperlukan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas. (Ageng, 2023).

Selain upaya preventif melalui pelaksanaan pengendalian internal yang memadai melalui SPIP dan APIP, audit dari institusi audit nasional (Supreme Audit Institutions) yang berada diluar pemerintahan adalah mutlak untuk menyatakan bahwa pemerintahan telah dilaksanakan secara akuntabel. Peran dari Supreme Audit Institutions ini tidak lain adalah untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan value dari pemerintahan yang dijalankan (Shuaib, 2022). Dalam kerangka kebijakan di Indonesia, Negara melalui undang – undang keuangan negara mengatur bahwa dalam rangka penerapan asas umum pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan atau audit atas penggunaan setiap rupiah uang negara yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan wajib dilaksanakan dan kewenangan atas pemeriksaan keuangan tersebut menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui audit yang dilakukan BPK kinerja sebuah pemerintahan dapat dilihat baik atau buruknya didasarkan kepada temuan-temuan pemeriksaan BPK (Aziz, 2024).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah serangkaian kegiatan revidu, audit serta pengawasan yang bersifat integral pada tiap kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Pegawai, serta elemen lain yang terlibat dalam proses pemerintahan dalam rangka memperoleh keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dengan salah satu instrumennya melalui keandalan dari laporan keuangan. Djamil (2023) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat kematangan suatu penyelenggaraan SPIP digunakan sebuah instrumen evaluatif yang dikenal dengan istilah maturitas yang memiliki tingkatan level 1 sampai level 5. Masing-masing level menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP pemerintahan tersebut. Penelitian Abatasi dan Kengere (2022) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja keuangan otoritas pemerintah daerah Kesimpulan penelitian serupa diperoleh Sukmawati (2023) dan Welly (2021).

**H1a : Maturitas SPIP memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal**

**H1b : Maturitas SPIP memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

**H1c : Maturitas SPIP memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Efektifitas PAD**

**H1d : Maturitas SPIP memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

#### **Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah unsur dari pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit, revidu, penilaian, pemantauan, serta aktivitas supervisi maupun pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas serta fungsi pemerintahan. APIP memiliki fungsi selayaknya auditor internal yang berkewajiban untuk mendeteksi secara dini segala potensi fraud atau korupsi (Rustendi, 2017). Dalam sektor publik fungsi pemantauan dan pengawasan kinerja ini menjadi tugas APIP. Auditor internal pemerintah melalui audit internal yang dilakukan memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah (Aikins, 2011). Muchiri dan Jagongo (2017) menyimpulkan bahwa keberadaan auditor internal memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kinerja keuangan pada Komisi Daging di Kenya. Dilapanga (2023), juga menemukan bahwa keberadaan aparat pengawasan intern

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja instansi yang kinerja keuangan termasuk didalamnya.

**H2a : Kapabilitas APIP memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal**

**H2b : Kapabilitas APIP memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

**H2c : Kapabilitas APIP memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Efektifitas PAD**

**H2d : Kapabilitas APIP memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

### **Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Temuan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan gambaran dari permasalahan yang ada pada proses pengelolaan keuangan oleh penyelenggara negara ataupun pihak-pihak yang mendapatkan mandat. Semakin banyak temuan pemeriksaan ditemukan dapat diartikan semakin banyak masalah yang ada di pengelolaan keuangan pemerintahan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Tama (2018) menyatakan bahwa temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, artinya bahwa apabila temuan yang ditemukan tinggi maka kinerja keuangan daerah tersebut dapat dikatakan tidak baik. Kesimpulan dari penelitian ini diperkuat dengan kesimpulan dari penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012). Indikasi bahwa temuan audit memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi secara negatif terhadap kinerja keuangan juga ditemukan dalam penelitian Kurnia (2020).

**H3a : Temuan Audit BPK memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

**H3b : Temuan Audit BPK memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

**H3c : Temuan Audit BPK memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Efektifitas PAD**

**H3d : Temuan Audit BPK memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

### **Pengaruh Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara mengamanatkan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan auditor atas temuan pemeriksaan harus ditindaklanjuti, dijawab, dan diberikan jawaban. Tindaklanjut atas rekomendasi pemeriksaan ini merupakan wujud dari perbaikan atas kekurangan ataupun kesalahan yang ditemukan oleh auditor BPK agar tidak terulang. Penelitian Kurnia (2020) menyimpulkan bahwa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan secara signifikan berpengaruh positif kepada kinerja pemerintah daerah. Kesimpulan dari Penelitian Kurnia (2020) didukung pula dengan kesimpulan penelitian Halimah (2017) yang juga menemukan hasil/kesimpulan yang sama.

**H4a : Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

**H4b : Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan**

**H4c : Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Efektifitas PAD**

**H4d : Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

## Metodologi Penelitian

### Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian causal study. Sekaran (2016) menjelaskan bahwa causal study merupakan sebuah studi penelitian yang dilakukan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel. Penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel independen berupa Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap variabel dependen kinerja keuangan daerah. Penelitian ini memakai unit analisis organisasi berupa pemerintah provinsi di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan jenis data time series yang memungkinkan tergambarnya segala jenis dinamika dan tren atau kecenderungan perubahan dari variabel-variabel yang diteliti selama periode 2018 sampai dengan 2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat uji *software* SPSS.

### Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
1.	Derajat Desentralisasi Fiskal	Instrument/rasio yang menunjukkan performa keuangan suatu daerah ditinjau dari perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah suatu daerah dengan Total Pendapatan Daerah tersebut (Siregar dan Mariana, 2020)	$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$
2	Kemandirian Keuangan Daerah	Instrument/rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam upaya daerah tersebut untuk mendanai secara mandiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bersumber dari pajak dan	$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$

No.	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
		retribusi yang telah dibayarkan dari masyarakat. (Siregar dan Mariana, 2020)	
3	Efektivitas PAD	Rasio yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan realisasi PAD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan suatu Pemerintah Daerah. (Siregar dan Mariana, 2020)	Rasio Efektivitas PAD = $\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$
4	Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio untuk menilai tingkat realisasi belanja suatu pemerintah daerah dibandingkan dengan tingkat realisasi penerimaan pendapatan daerah (PAD) tersebut (Siregar dan Mariana, 2020)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah = $\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$
5	Maturitas SPIP	Instrumen yang digunakan untuk menilai implementasi dari sebuah pengendalian internal yang dijalankan (Prakoso,2023)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah (Prakoso, 2023)
6	Kapabilitas APIP	kemampuan APIP suatu pemerintahan untuk dapat melaksanakan aktivitas pengawasan untuk dapat menghasilkan suatu hasil pengawasan yang berkualitas dan mampu melaksanakan fungsi pengawasan tersebut secara efektif (Peraturan BPKP No 8 Tahun 2021)	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah (Suhartono,2021)
7	Temuan Audit	Kasus yang ditemukan oleh auditor BPK yang	Jumlah rupiah temuan audit (Tama, 2018)

No.	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
		memenuhi kriteria bahwa kasus tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan pengendalian internal yang berlaku (Sudarsana, 2013)	
8	Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Proses pemberian jawaban dan perbaikan atas rekomendasi yang ditemukan oleh auditor (Parwanto, 2017)	Jumlah Temuan yang sudah ditindaklanjuti (Rp)/Total Temuan Pemeriksaan (Rp) (Parwanto,2017)

**Hasil Uji Deskripsi Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut

**Tabel 1 Data Penelitian**

No.	Deskripsi	Total
1.	Jumlah provinsi pada tahun 2018 – 2021	34
2.	Jumlah data selama 2018 – 2021 (4 tahun)	136
3.	Jumlah provinsi pada tahun 2022	38
4.	Jumlah provinsi yang tidak tersedia datanya pada tahun 2022	(4)
	Jumlah data sebagai populasi	170
	Jumlah data dalam penelitian	170

**Hasil Penelitian Deskriptif**

**Tabel 2 Statistika Deskriptif**

Variabel	Statistika Deskriptif				
	N	Mean	Minimum	Maximum	Standar Deviasi
Maturitas SPIP	170	2.7706	1.00	3.00	0.48683
Kapabilitas APIP	170	2.4765	1.00	3.00	0.56739
Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	170	0.5438	0.00	1.00	0.26610
Temuan Pemeriksaan	170	2.190.140.000	0	511.423.839.530	5.7481
RDDF_Y1	170	0.3759	0.04	.73	0.15853
RKKD_Y2	170	0.7720	0.07	3.15	0.55641
REfektifitas_PAD_Y3	170	1.0471	0.58	3.22	0.24247
REfisiensi_Keu_Y4	170	0.9935	0.74	1.22	0.06398

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil Statistik deskriptif menunjukkan untuk nilai minimum Maturitas\_SPIP yaitu 1.00 dengan nilai maximum sebesar 3.00, nilai mean 2,7706 dengan

standar deviasi sebesar 0.45683. Hal ini dapat diartikan bahwa Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi di Indonesia masih ada yang berada didalam rentang level 1 sampai dengan level 3 dengan rata-rata telah berada pada level 2 atau berkembang. Nilai minimal untuk variabel Maturitas\_SPIP ini ditunjukkan oleh data level maturitas SPIP dari beberapa Pemerintah Provinsi diantaranya Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rentang tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020, dan oleh Provinsi Papua pada tahun anggaran 2018. Nilai Maksimum variabel Maturitas\_SPIP ditunjukkan oleh data level maturitas SPIP dari sebagian besar di Indonesia. Pada tahun anggara 2022 seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku sudah memiliki level maturitas SPIP pada level 3.

Variabel Kapabilitas\_APIP memiliki nilai minimum sebesar 1.00, nilai maximumnya mencapai 3.00 nilai mean sebesar 2,4765 dengan standar deviasi sebesar 0.56739. Hal ini dapat diartikan bahwa Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi secara rata-rata telah berada pada level 2 atau *instructure* yaitu tahapan APIP telah memiliki prosedur dan praktik audit intern yang berkelanjutan walaupun secara keseluruhan level kapabilitas pemerintah provinsi bervariasi dari level 1 sampai dengan level 3. Nilai Minimum variabel Kapabilitas APIP ini diantaranya ditunjukkan oleh level kapabilitas APIP Provinsi Riau pada rentang tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 serta Provinis Aceh pada tahun anggaran 2019. Sedangkan nilai maksimum variabel Kapabilitas APIP ditunjukkan oleh sebagian besar provinsi di Indonesia pada tahun anggaran 2022 yang meliputi seluruh Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Nilai minimum pada variabel Tindaklanjut\_atas\_Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 1.00 dengan nilai mean sebesar 0.5438 dan standar deviasi sebesar 0.2661. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata Pemerintah Provinsi berhasil menindaklanjuti 54,38% dari jumlah rekomendasi yang diberikan atas laporan keuangannya dan di satu sisi terdapat pemerintah provinsi yang sama sekali tidak menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangannya seperti Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 serta di sisi lain terdapat pemerintah provinsi yang menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangannya seperti Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2020.

Pada variabel Temuan\_Pemeriksaan didapatkan nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maximum sebesar 511.423.839.530,49 dengan nilai mean sebesar 2.190.140.000 dan standar deviasi sebesar 5.7481. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia adalah sebesar 2.190.140.000 Nilai minimum variabel Temuan Pemeriksaan terlihat pada pada Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2021 yang pada tahun anggaran tersebut sama sekali tidak ditemukan temuan pemeriksaan oleh BPK. Di sisi lain nilai maximum dari variabel ini ditunjukkan oleh temuan pemeriksaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2022.

Pada variabel RDDF\_Y1 memiliki nilai minimum yaitu 0.04 dan nilai maximum sebesar 0.73 dengan nilai mean sebesar 0.3759 dan standar deviasi sebesar 0.15853. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata Pemerintah Provinsi di Indonesia memiliki tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal yang berada pada kategori cukup walaupun terdapat pula Pemerintah Provinsi yang masih berada pada kategori Sangat Kurang. Nilai Minimum variabel ini ditunjukkan oleh rasio desentralisasi fiskal provinsi Papua Barat pada tahun 2019 dan nilai maksimum variabel ini ditunjukkan oleh rasio desentralisasi fiskal provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019.

Variabel RKKD\_Y2 memiliki nilai minimum sebesar 0.07 sedangkan nilai maximum sebesar 3.15 dengan nilai mean 0.7720 dan standar deviasi sebesar 0.55641. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia memiliki tingkat kemandirian daerah yang tinggi walaupun masih ada pemerintah provinsi yang berada di kategori rendah

sekali. Nilai minimum dari variabel ini ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2019 dan nilai maximum ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019.

Kemudian untuk variabel REfektifitas\_PAD\_Y3 memiliki nilai minimum sebesar 0.58 dan nilai maximum mencapai 3.22 dengan nilai mean sebesar 1.0471 dan standar deviasi sebesar 0,24247. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia telah berada pada kategori sangat efektif walaupun masih ada pemerintah provinsi yang masih berada di kategori tidak efektif. Nilai minimum dari variabel ini ditunjukkan oleh rasio efektifitas PAD provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2018 dan nilai maximumnya ditunjukkan oleh rasio efektifitas PAD provinsi Papua pada tahun 2019.

Terakhir pada variabel REfisiensi\_Keu\_Y4 memiliki nilai minimum sebesar 0.74 dan nilai maximum sebesar 1.22 dengan nilai mean sebesar 0.9935 dan standar deviasi sebesar 0.06398. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia masih berada di kategori tidak efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Nilai minimum terdapat pada pemerintah provinisi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2022 dan nilai maximum terdapat pada pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2020.

### Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data. Dilakukannya uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi data yang akan digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, autokolerasi dan multikolinearitas. Berikut merupakan hasil dari masing-masing uji asumsi klasik yang ada dalam penelitian ini.

#### 1. Uji Normalitas

**Tabel 3 Tabel Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual	Unstandardized Residual	Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N	170	170	170	170
Mean	0E-7	0E-7	0E-7	0E-7
Normal Parameters <sup>a,b</sup> Std. Deviation	.12897211	.44827315	.23867110	.06361258
Most Extreme Differences	Absolute	.038	.106	.132
	Positive	.038	.106	.132
	Negative	-.028	-.064	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.490	1.284	1.268
Asymp. Sig. (2-tailed)		.970	.053	.055

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil tabel 8 Dilakukan uji asumsi klasik dan menghasilkan data yang memenuhi uji normalitas. Berdasarkan hasil pada tabel 8 diketahui nilai dari statistik normalitas seluruhnya diatas nilai probabilitas > 0.05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas metode Glejser**

Model	Koefisien			Sig
	Unstandarized Coefficient		Standardized Coefficient	
	B	Std Error	Beta	
Constant	0.019	0.245		0.937
Maturitas SPIP	0.103	0.086	0.102	0.235
Kapabilitas APIP	0.102	0.076	0.118	0.178
Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	0.015	0.006	0.172	0.124
Temuan Pemeriksaan	0.075	0.151	0.041	0.619

Variabel Dependen : Abs\_Res

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 9 menunjukkan hasil bahwa nilai asymp sig masing masing variabel  $\geq 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedistisitas pada residual

3. Uji Multikolinearitas

**Tabel 5 Uji Multikolinearitas**

Variabel Independen	Variabel Dependen							
	RDDF		RKKD		REfektivitasPAD		REffisiensiKeu	
	Collinearity Tolerance	Statistics VIF	Collinearity Tolerance	Statistics VIF	Collinearity Tolerance	Statistics VIF	Collinearity Tolerance	Statist VIF
Maturitas SPIP	0.779	1.284	0.779	1.284	0.779	1.284	0.779	1.284
Kapabilitas APIP	0.747	1.339	0.747	1.339	0.747	1.339	0.747	1.339
Temuan Pemeriksaan	0.993	1.007	0.993	1.007	0.993	1.007	0.993	1.007
Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	0.849	1.178	0.849	1.178	0.849	1.178	0.849	1.178

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen terhadap variabel dependen bernilai kurang dari 10. Oleh karena itu dari hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 10 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

4. Uji Autokorelasi

**Tabel 6 Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson**

Variabel Independen	Variabel Dependen			
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Efektifitas PAD	Rasio Efisiensi Keuangan



	Durbin-Watson	Durbin-Watson	Durbin-Watson	Durbin-Watson
Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Temuan Pemeriksaan, Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	1.117	1.230	1.738	1.452
Nilai 4-Du (Du =1,79)	2,21	2,21	2,21	2,21
Kesimpulan	Terjadi Gejala Autokorelasi	Terjadi Gejala Autokorelasi	Terjadi Gejala Autokorelasi	Terjadi Gejala Autokorelasi

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 12 nilai dari statistik menunjukkan nilai untuk nilai durbin watson terhadap masing-masing variabel dependen secara keseluruhan tidak bernilai diantara 1.79 (Du) dan 2.21 (4-Du) maka terjadi gejala autokorelasi. Oleh karena itu untuk penyembuhan gejala autokorelasi dilakukan analisis Run test (Cohran orchut). Apabila nilai sig > 0.05 maka penyembuhan berhasil dan tidak terjadi gejala autokorelasi. Berikut adalah hasil analisis Run Test dengan SPSS.

**Tabel 7 Uji Autokorelasi dengan Run Test**

Runs Test				
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Efektifitas PAD	Rasio Efisiensi Keuangan
<b>Test Value<sup>a</sup></b>	-0.00190	-0.09406	-0.00881	-0.00379
<b>Cases &lt; Test Value</b>	85	85	85	85
<b>Cases &gt;= Test Value</b>	85	85	85	85
<b>Total Cases</b>	170	170	170	170
<b>Number of Runs</b>	66	69	80	80
<b>Z</b>	-1.177	-1.162	-0.923	-.0923
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>	0.121	0.139	0.356	0.356

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa untuk semua pengujian Runs Test nilai sig > 0.05 . Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa gejala autokorelasi tidak terjadi

### Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 8 Analisis Regresi Linear Berganda 1**

Variabel	Prediksi Arah	B	t	Sig. one tail
Konstanta		-0.127		
Maturitas_SPIP	+	0.103	4.420	0.000
Kapabilitas_APIP	+	0.050	2.428	0.016
Temuan_Pemeriksaan	-	-0.008	-4.853	0.000
Tindaklanjut_atas_Rekomendasi_Hasil_Pemeriksaan	+	0.140	3.429	0.001

a. Dependent Variable: RDDDF\_Y1

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi pertama sebagai berikut

$$Y1 = -0.127 + 0.103 X1 + 0.050 X2 - 0.008 X3 + 0.140 X4$$

**Tabel 9 Analisis Regresi Linear Berganda 2**

Variabel	Prediksi Arah	B	t	Sig. one tail
Konstanta		-0.532		
Maturitas_SPIP	+	0.197	2.422	0.017
Kapabilitas_APIP	+	0.156	2.198	0.029
Temuan_Pemeriksaan	-	-0.044	-7.290	0.000
Tindaklanjut_atas_Rekomendasi_Hasil_Pemeriksaan	+	0.508	3.570	0.000

a. Dependent Variable: RKKD\_Y2

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi kedua sebagai berikut

$$Y2 = -0.532 + 0.197 X1 + 0.156 X2 - 0.044 X3 + 0.508 X4$$

**Tabel 10 Analisis Regresi Linear Berganda 3**

Variabel	Prediksi Arah	B	t	Sig. one tail
Konstanta		1.205		
Maturitas_SPIP	+	0.003	0.072	0.017
Kapabilitas_APIP	+	-0.044	-1.154	0.942
Temuan_Pemeriksaan	-	-0.006	-1.725	0.086
Tindaklanjut_atas_Rekomendasi_Hasil_Pemeriksaan	+	-0.806	-1.131	0.260

a. Dependent Variable: REfektifitas\_PAD\_Y3

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi ketiga sebagai berikut

$$Y_3 = 1.205 + 0.003 X_1 - 0.044 X_2 - 0.006 X_3 - 0.806 X_4$$

**Tabel 11 Analisis Regresi Linear Berganda 4**

Variabel	Prediksi Arah	B	t	Sig. one tail
Konstanta		0.992		
Maturitas_SPIP	+	0.001	0.115	0.909
Kapabilitas_APIP	+	0.003	0.252	0.801
Temuan_Pemeriksaan	-	-0.001	-1.102	0.272
Tindaklanjut_atas_Rekomendasi_Hasil_Pemeriksaan	+	-0.012	-0.613	0.540

a. Dependent Variable: REfisiensi\_Keu\_Y4

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi keempat sebagai berikut

$$Y_4 = 0.992 + 0.001 X_1 + 0.003 X_2 - 0.001 X_3 - 0.012 X_4$$

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 12 Analisis Koefisien Determinasi**

Persamaan Regresi	R-Squared	Adjusted R-Squared
Persamaan Regresi 1	0,340	0,324
Persamaan Regresi 2	0,351	0,335
Persamaan Regresi 3	0,031	0,008
Persamaan Regresi 4	0,012	-0,012

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 17, diketahui bahwa nilai R-Squared Persamaan Regresi 1 sebesar 0.34 Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 32,4% variabel x mempengaruhi Y, sedangkan sisanya 67,8% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian. Persamaan Regresi 2 memiliki R-Squared sebesar 0.335 Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 33,5% variabel x mempengaruhi Y, sedangkan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian. Persamaan Regresi 3 memiliki R-Squared sebesar 0.031 Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 3,1% variabel x mempengaruhi Y, sedangkan sisanya 96,9% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian. Persamaan Regresi 4 memiliki R-Squared sebesar 0.012 Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 1,2% variabel x mempengaruhi Y, sedangkan sisanya 98,8% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.

### Uji F

**Tabel 13 Analisis Uji F**

Persamaan Regresi	F Statistik	Sig.	Kesimpulan
Persamaan Regresi 1	21.243	0,000	Secara Simultan Berpengaruh
Persamaan Regresi 2	22,301	0,000	Secara Simultan Berpengaruh

Persamaan Regresi 3	1,323	0,263	Secara Simultan Tidak Berpengaruh
Persamaan Regresi 4	0,483	0,748	Secara Simultan Tidak Berpengaruh

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 18 untuk persamaan regresi 1 maka dapat diketahui nilai Prob (F-statistic) sebesar  $0.000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Untuk persamaan regresi 2 diketahui nilai Prob (F-statistic) sebesar  $0.000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap terhadap variabel dependen (Y). Untuk persamaan regresi 3 dan persamaan regresi 4 nilai Prob (F-statistic) masing sebesar  $0.263 > 0,05$  dan  $0,748 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak sehingga dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap terhadap variabel dependen (Y) untuk kedua persamaan regresi tersebut.

### Uji t

**Tabel 14 Uji t Persamaan Regresi 1**

Variabel	Prediksi Arah	B	t	Sig. one tail	Kesimpulan
Konstanta		-0.127			
Maturitas_SPIP	+	0.103	4.420	0.000	H1a diterima
Kapabilitas_APIP	+	0.050	2.428	0.016	H2a Diterima
Temuan_Pemeriksaan	-	-0.008	-4.853	0.000	H3a diterima
Tindaklanjut_atas_Rekomendasi_Hasil_Pemeriksaan	+	0.140	3.429	0.001	H4a diterima

a. Dependent Variable: RDDDF\_Y1

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

**Tabel 15 Uji t Persamaan Regresi 2**

Variabel	Prediksi Arah	B	t	Sig. one tail	Kesimpulan
Konstanta		-0.532			
Maturitas_SPIP	+	0.197	2.422	0.017	H1b diterima
Kapabilitas_APIP	+	0.156	2.198	0.029	H2b diterima
Temuan_Pemeriksaan	-	-0.044	-7.290	0.000	H3b diterima
Tindaklanjut_atas_Rekomendasi_Hasil_Pemeriksaan	+	0.508	3.570	0.000	H4b diterima

a. Dependent Variable: RKKD\_Y2

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

**Tabel 16 Uji t Persamaan Regresi 3**

Variabel	Prediksi Arah	B	t	Sig. one tail	Kesimpulan
Konstanta		1.205			
Maturitas_SPIP	+	0.003	0.072	0.017	H1c diterima
Kapabilitas_APIP	+	-0.044	-1.154	0.942	H2c ditolak
Temuan_Pemeriksaan	-	-0.006	-1.725	0.086	H3c diterima
Tindaklanjut_atas_Rekomendasi_Hasil_Pemeriksaan	+	-0.806	-1.131	0.260	H4c ditolak

a. Dependent Variable: REfektifitas\_PAD\_Y3

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

**Tabel 17 Uji t Persamaan Regresi 4**

Variabel	Prediksi Arah	B	t	Sig. one tail	Kesimpulan
Konstanta		0.992			
Maturitas_SPIP	+	0.001	0.115	0.909	H1d ditolak
Kapabilitas_APIP	+	0.003	0.252	0.801	H2d ditolak
Temuan_Pemeriksaan	-	-0.001	-1.102	0.272	H3d ditolak
Tindaklanjut_atas_Rekomendasi_Hasil_Pemeriksaan	+	-0.012	-0.613	0.540	H4d ditolak

a. Dependent Variable: REfisiensi\_Keu\_Y4

Sumber : Olah Data SPSS, 2024

## Pembahasan

### Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan nilai X1 Maturitas SPIP memiliki nilai koefisien 0.103 dengan nilai sig ( 0.000/2) (< 0.05) dan t hitung 4.420 (> t tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X1 Maturitas SPIP memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah yang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa tinggi rendahnya maturitas SPIP akan mempengaruhi tinggi rendahnya PAD daerah. Hasil interpretasi ini sejalan dengan hasil penelitian Magu & Kibati (2016) yang menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang baik akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Hasil penelitian serupa juga



dapat dilihat dari penelitian Tandri et al (2015) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pendapatan (revenue) dan pengeluaran kas.

### **Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X1 Maturitas SPIP memiliki nilai koefisien 0.197 dengan nilai sig (0.017/2) ( $< 0.05$ ) dan t hitung 2.422 ( $> t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X1 Maturitas SPIP memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah yang ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Putriana (2018) yang menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan komponen yang memberikan pengaruh positif signifikan terhadap ketercapaian pendapatan daerah yang merupakan komponen utama dalam mencapai kemandirian daerah.

### **Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Efektifitas PAD**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X1 Maturitas SPIP memiliki nilai koefisien 0.003 dengan nilai sig (0.017/2) ( $< 0.05$ ) dan t hitung 0.072 ( $< t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X1 Maturitas SPIP memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang ditinjau dari rasio efektifitas PAD. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abrar (2017) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat keandalan SPI sebuah lembaga/daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sendiri menurut Halim & Kusufi (2007) dapat direpresentasikan dengan nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa level maturitas SPIP yang tinggi akan meningkatkan pengendalian dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Efisiensi Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X1 Maturitas SPIP memiliki nilai koefisien 0.001 dengan nilai sig (0.909/2) ( $> 0.05$ ) dan t hitung 0.115 ( $< t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X1 Maturitas SPIP tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang ditinjau dari rasio efisiensi keuangan. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa tingkatan capak atau tidaknya SPIP tidak menggambarkan performa realisasi belanja maupun realisasi PAD pemerintah. Hasil interpretasi ini sejalan dengan penelitian Abdullah et al (2015) dan Oktaliza (2020) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja terfokus pada unsur perencanaan, komitmen manajemen, kualitas SDM dan regulasi. Berdasarkan teori keagenan, agent memiliki keutungan sebagai insider untuk dapat menentukan target sebesar apa yang mereka ingin capai saja sehingga target akan cenderung agent tetapkan seminimalkan mungkin. Termasuk didalamnya adalah target dalam realisasi belanja maupun pendapatan.

#### **4.2.5 Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X2 Kapabilitas APIP memiliki nilai koefisien 0.050 dengan nilai sig (0.016/2) ( $< 0.05$ ) dan t hitung 2.428 ( $> t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X2 Kapabilitas APIP memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibowo (2018) yang menyebutkan APIP

memiliki pengaruh positif dalam penguatan kapasitas fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah yang termasuk didalamnya adalah nilai realisasi PAD yang menjadi komponen utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat desentralisasi fiskal

### **Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X2 Kapabilitas APIP memiliki nilai koefisien 0.156 dengan nilai sig (0.029/2) ( $< 0.05$ ) dan t hitung 2.198 ( $> t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X2 Kapabilitas APIP memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah. Tingkat Kapabilitas APIP merepresentasikan sebaik apa kualitas dan kemampuan APIP suatu daerah dalam melaksanakan tugasnya (Prakoso, 2024). Tugas tersebut diantaranya adalah melakukan reuiu, pengawasan dan audit internal terhadap jalannya pemerintahan (Perpes No 95 tahun 2018). Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat kapabilitas APIP auatu daerah maka fungsi APIP akan semakin baik termasuk didalamnya adalah fungsi pengawasan dan audit dan atas baiknya fungsi APIP ini akan mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah . Hasil Interpretasi penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustina (2018) yang menyatakan bahwa audit internal yang dilakukan APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Hasil penelitian serupa juga didapatkan oleh penelitian Habibillah (2020) yang menyebutkan bahwa audit internal APIP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah.

### **Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Efektifitas PAD**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X2 Kapabilitas APIP memiliki nilai koefisien - 0.044 dengan nilai sig (0.942/2) ( $> 0.05$ ) dan t hitung 1.154 ( $> t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X2 Kapabilitas APIP tidak memberikan terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio efektifitas PAD. Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa baik tidaknya kecakapan dan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi pengawasan, audit, dan reuiu tidak mempengaruhi tingkat realisasi dan anggaran dari PAD suatu daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Riswanto (2013) yang menyebutkan bahwa audit internal yang merupakan fungsi dari APIP tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur berdasarkan realiasi PAD. Dalam teori keagenan, agent akan cenderung menetapkan target seminimal mungkin demi kepentingan mereka sendiri sedangkan principal menginginkan target pencapaian yang tinggi. Kapabilitas APIP sebagai instrumen principal unntuk mengawasi ketercapaian target yang tinggi ini akan menjadi tidak berpengaruh karena sebagaimana disebutkan dalam penelitian Abdullah (2015) dan Oktaliza (2020) faktor-faktor yang mempengaruhi realiasis anggaran cenderung berada ditangan agent yaitu meliputi regulasi, kualitas SDM dan komitmen manajemen.

### **Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Efisiensi Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X2 Kapabilitas APIP memiliki nilai koefisien 0.003 dengan nilai sig (0.801/2) ( $> 0.05$ ) dan t hitung 0.252 ( $> t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X2 Kapabilitas APIP tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio rasio efisiensi keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hani (2022) yang menyebutkan bahwa APIP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja belanja daerah. Dalam penelitian lain yang dilakukan Negara (2019) menjelaskan

bahwa kapabilitas APIP berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian internal pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah, namun keputusan atas nilai belanja daerah yang terealisasi dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih kuat seperti keadaan masyarakat dan karakteristik pemerintah daerah. Realisasi belanja daerah yang dipengaruhi oleh banyak faktor lain ini dapat diartikan bahwa nilai efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang di dalamnya terdapat komponen realisasi belanja daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kapabilitas APIP.

### **Pengaruh Temuan Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X3 Temuan\_Pemeriksaan memiliki nilai koefisien -0.008 dengan nilai sig (0.000/2) ( $< 0.05$ ) dan t hitung 4.853 ( $> t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X3 Temuan\_Pemeriksaan memberikan pengaruh negatif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa ketika temuan audit suatu daerah banyak, maka kinerja keuangan daerah tersebut akan cenderung turun. Budiana (2021) menyebutkan bahwa penyimpangan atas pengelolaan keuangan akan menurunkan kinerja keuangan. Dalam konsep pengelolaan keuangan daerah temuan audit berperan sebagai alat deteksi dari penyimpangan ini sehingga dapat disimpulkan ketika semakin banyak temuan audit yang ditemukan pada suatu pemerintah daerah, semakin banyak pula penyimpangan yang terjadi dan dampaknya kinerja keuangan daerah tersebut akan turun. Hasil ini sesuai dengan penelitian Mahmudi (2016) yang menyebutkan bahwa adanya temuan audit pada suatu daerah akan mendorong intervensi dari pemerintah pusat yang mengakibatkan turunnya tingkat desentralisasi fiskal daerah yang berarti kinerja keuangan daerah tersebut turun.

### **Pengaruh Temuan Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X3 Temuan\_Pemeriksaan memiliki nilai koefisien -0.044 dengan nilai sig (0.000/2) ( $< 0.05$ ) dan t hitung 7.290 ( $> t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X3 Temuan\_Pemeriksaan memberikan pengaruh negatif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hoeruddin (2017) yang menyatakan bahwa temuan audit BPK memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian yang serupa juga ditemukan oleh Siregar (2018) yang menyebutkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat realisasi pendapatan asli daerah yang merupakan komponen utama dari kemandirian keuangan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen keuangan daerah (Halim, 2004). Oleh karena itu secara mandatory bagus tidaknya pengelolaan keuangan bergantung pada agent yang dapat menjaga akuntabilitas atau tidak.

### **Pengaruh Temuan Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Efektifitas PAD**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X3 Temuan\_Pemeriksaan memiliki nilai koefisien -0.006 dengan nilai sig (0.086/2) ( $< 0.05$ ) dengan t hitung -1.725 ( $< t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X3 Temuan\_Pemeriksaan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio efektifitas PAD. Hasil ini sesuai dengan penelitian Safitri et al (2024) yang menyebutkan bahwa temuan audit secara negatif dan signifikan mempengaruhi efektifitas keuangan daerah. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Tama (2018)

yang menyebutkan bahwa temuan pemeriksaan BPK berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur berdasarkan rasio efektifitas.

terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Efisiensi Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan nilai X3 Temuan\_Pemeriksaan memiliki nilai koefisien -0.001 dengan nilai sig (0.272/2) ( $> 0.05$ ) dengan t hitung -1.102 ( $< t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X3 Temuan\_Pemeriksaan tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio efisiensi keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widiarti (2015) yang menyebutkan bahwa temuan audit tidak mempengaruhi secara signifikan kinerja pemerintahan yang salah satu pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada tingkat efisiensi anggaran. Hasil serupa diperoleh dari hasil penelitian (Noviyanti, 2016) yang menyebutkan bahwa temuan audit tidak mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi keuangan.

### **Pengaruh Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X4 Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki nilai koefisien 0.140 dengan nilai sig (0.001/2) ( $< 0.05$ ) dan t hitung 3.429 ( $> t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X4 Tindaklanjut atas Rekomendasi memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yamin (2019) yang menyebutkan bahwa tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan yang dihitung melalui realisasi PAD dan belanja. Hasil penelitian ini didukung oleh Siregar (2018) yang menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh tindaklanjut temuan audit BPK. Melalui rekomendasi atas tindaklanjut hasil pemeriksaan, pemerintah selaku agent dapat mengoptimalkan rekomendasi dari BPK untuk menanggulangi kelemahan yang ada sehingga dapat meningkatkan kepercayaan principal. Peningkatan kepercayaan principal ini akan berdampak pada peningkatan pelaksanaan kewajiban principal seperti pembayaran pajak dan retribusi sehingga dapat mendorong peningkatan PAD yang merupakan unsur utama dalam mencapai desentralisasi fiskal.

### **Pengaruh Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan nilai X4 Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki nilai koefisien 0.508 dengan nilai sig (0.000/2) ( $< 0.05$ ) dan t hitung 3.570 ( $> t$  tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa X4 Tindaklanjut atas Rekomendasi memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ismawati (2018) yang menyebutkan bahwa tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Siregar (2018) menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh temuan audit BPK. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika rekomendasi dijalankan dan diselesaikan dengan baik maka kelemahan dalam pos pendapatan ataupun pos-pos keuangan daerah yang lain dapat diperbaiki dan akan mendorong kepada peningkatan kinerja keuangan daerah (Pratama, 2022).

### **Pengaruh Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Efektifitas PAD**

Hasil penelitian menunjukkan nilai  $X_4$  Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki nilai koefisien  $-0.806$  dengan nilai sig  $(0.260/2) (> 0.05)$  dan  $t$  hitung  $-1.131 (> t$  tabel  $(1.97)$  maka dapat dinyatakan bahwa  $X_4$  Tindaklanjut atas Rekomendasi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio efisiensi keuangan. Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa tindaklanjut atas rekomendasi pemeriksaan oleh pemerintah daerah selaku entitas yang diperiksa tidak memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur berdasarkan efektifitas PAD. Hasil penelitian ini serupa juga terdapat dalam penelitian Syah (2022) yang menyebutkan bahwa baik temuan audit maupun tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaannya tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur berdasarkan rasio efektifitas, efisiensi dan ekonomis.

### **Pengaruh Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang dinilai dari Rasio Efisiensi Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan nilai  $X_4$  Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki nilai koefisien  $-0.012$  dengan nilai sig  $(0.540/2) (> 0.05)$  dan  $t$  hitung  $-0.613 (> t$  tabel  $(1.97)$  maka dapat dinyatakan bahwa  $X_4$  Tindaklanjut atas Rekomendasi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio efisiensi keuangan. Hasil penelitian ini serupa juga terdapat dalam penelitian Syah (2022) yang menyebutkan bahwa baik temuan audit maupun tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaannya tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur berdasarkan rasio efektifitas, efisiensi dan ekonomis. Efisiensi Keuangan suatu daerah dipengaruhi oleh realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah sangat bergantung pada kualitas dari Sumber Daya Manusia yang mengelolanya (Safpremi, 2022).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $X_1$  Maturitas SPIP memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah yang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal
2. Hasil penelitian bahwa  $X_2$  Kapabilitas APIP memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal.
3. Hasil penelitian bahwa  $X_3$  Temuan\_Pemeriksaan memberikan pengaruh negatif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $X_4$  Tindaklanjut atas Rekomendasi memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $X_1$  Maturitas SPIP memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah yang ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $X_2$  Kapabilitas APIP memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah.

7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa X3 Temuan\_Pemeriksaan memberikan pengaruh negatif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah.
8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa X4 Tindaklanjut atas Rekomendasi memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah.
9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa X1 Maturitas SPIP memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang ditinjau dari rasio efektifitas PAD
10. Hasil penelitian bahwa X2 Kapabilitas APIP tidak memberikan terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio efektifitas PAD
11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa X3 Temuan\_Pemeriksaan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio efektifitas PAD.
12. Hasil penelitian bahwa X4 Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tidak memberikan pengaruh positif atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio efektifitas PAD.
13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa X1 Maturitas SPIP tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang ditinjau dari rasio efisiensi keuangan
14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa X2 Kapabilitas APIP tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio rasio efisiensi keuangan.
15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa X3 Temuan\_Pemeriksaan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio efisiensi keuangan.
16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa X4 Tindaklanjut atas Rekomendasi tidak memberikan yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah ditinjau dari rasio efisiensi keuangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abatesi, A., & Osiemo K. A. (2022). Effect of internal control activities on financial performance of Rwanda Association of Local Government Authorities. *International Journal of Advanced Scientific Research and Management*, 7(10), 1–9. <https://doi.org/10.36282/ijasrm/7.10.2022.1879>
- Abrar, A. A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijawa*.
- Ageng, Y. R., & Usman, F. (2023). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Opini Audit. *Jurnalku*, 3(4), 390-401.
- Agustina, Adinna. (2015). *Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten kota dengan akuntabilitas keuangan sebagai variabel intervening*. Prosiding Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Agustina, Ananda. (2018). *Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kota Serang)*. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Aikins, S. K. (2011). An Examination of Government Internal Audits' Role in Improving Financial Performance. *Public Finance and Management*, 11(4), 306-337. <https://doi.org/10.1177/152397211101100401>

- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2020). *EProceedings of Management*, 8(6).
- Dilapanga, Ridwan., Puluhulawa, Fenty U, Kasim, Nur M. (2023). Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Kinerja Instansi. *Jurnal Palar Volume 09, Nomor 02, Maret-Juni 2023*.
- Fauzia, Rahmi, & Perengki, Susanto. (2023) “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kabupaten Pasaman.” *Jurnal Mirai Management 8, no. 2*.
- Habibillah, Syifa. (2020). *Pengaruh Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Tasikmalaya)*. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi Bandung
- Hoeruddin, A. (2017). Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 17(1), 1-18.
- Kurnia, D. (2020). Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 112-124.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 108-117.
- Lestari, K., Rahayu, S., & Yudi. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(2), 53–67. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i2.7796>
- Magu, J. K., & Kibati, P. (2016). Influence of Internal Control Systems on Financial Performance of Kenya Farmer's Association Limited. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol.IV, Issue 4, April 2016, 2348-0386.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan Daerah*. STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016). Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 16(2), 225-242.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Muchiri, N. W., & Jagongo, A. (2017). Internal auditing and financial performance of public institutions in Kenya: A case study of Kenya Meat Commission. *African Journal of Business Management*, 11(8), 168-174.
- Mustikarini, Widya Astuti., Fitriarsi, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.

- Negara, A.P., (2019). *Pengaruh Kapabilitas Apip, Jumlah Apip Dan Anggaran Belanja Langsung Apip Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Tesis Magister, Universitas Lampung Bandar Lampung
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant (s). *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112-128.
- Noviyanti, Ade N., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal* 5(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Nurarifah, R., & Aurora, T. L. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2)
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat. *Journal Image* (Vol. 9, Issue 1).
- Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(1), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Pradana, A., Sunardi, S., & Fahmi, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6802>
- Prakoso, F. B., & Aryati, T. (2024). The Effect of Control System Maturity The Effect of Control System Maturity and the Government Internal Oversight Capability Level on Audit Opinions. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 55–64. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i1.2418>
- Pratama, A. B. & Maslichah. (2022). Pengaruh Opini Audit Bpk, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(02), 47–57
- Putriana, dkk. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tangerang Selatan." *Jurnal Manajemen Universitas Islam Sultan Agung*, 2018, 123-134.
- Riswanto, H. (2013). *Pengaruh Audit Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Inspektorat Kabupaten Purwakarta)*. Doctoral dissertation, Universitas Widyatama.
- Russell, J. P. (2006). Generating audit findings and conclusions. *Quality Progress*, 39(12), 76.
- Ruwaida, Darwani & Abdullah, S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 4(2), 101-110
- Safitri, Dewi & Purnomo, Triatmaja. (2024). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Se-Provinsi Jawa Tengah Berkonsep Value For Money Saat Covid 19. *Jurnal Neraca*, 20(1).
- Shara N. K., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>
- Shuaib, A. H. O. (2022). Operational Strategies of Supreme Audit Institution and Financial Accountability in Nigerian Public Sector. Doctoral dissertation, Kwara State University, Nigeria.

- Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2). <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654>
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia)*. Doctoral dissertation, Universitas Diponegor, Semarang.
- Suhartono, R. (2021). Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. *Jurnal MAKSI UNTAN*, 6(2).
- Syah, R. A., Rotinsulu, T. O., & Rotinsulu, D. C. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Inspektorat Kota Bitung Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Inspektorat) Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7). <https://doi.org/10.35794/jpekd.2024.4.19.7.2018>
- Tama, I. G. M. A. A., & Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 1(1), 91–113. <https://doi.org/10.24246/persi.v1i1.p91-113>
- Undang-Undang Dasar 1945  
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Welly, S. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Jurnal Media Wahana Ekonomika* Vol 18 No (1). <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i1.5600>
- Yasin, M. (2018). Peran Temuan Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 17(1), 1-10